

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Konflik merupakan realitas yang kompleks dimana konflik melibatkan banyak faktor seperti individu ataupun kelompok yang terlibat dalam konflik, kepentingan dan berbagai model komunikasi dan hubungan. Konflik tidak bisa dihindari, tetapi harus di kelola.<sup>1</sup>

Ada beberapa alasan mengapa penulis memilih judul Upaya Perdamaian India-Pakistan dalam Menangani Konflik Kashmir, yaitu :

Pertama, Masalah Kashmir memang merupakan akar dari seluruh masalah hubungan antara India dan Pakistan sejak awal hingga hari ini. Konflik India-Pakistan terakhir, yang usaha perdamaianya kini tengah dilakukan kedua pihak, terjadi menyusul peristiwa serangan bunuh diri di gedung parlemen India di New Delhi, pada Desember 2001.

Kedua, Konflik berkepanjangan antara India dan Pakistan dalam perebutan wilayah Kashmir telah menarik banyak perhatian dari berbagai negara dalam upaya penyelesaian konflik tersebut. Konflik Kashmir telah menempatkan

---

<sup>1</sup>M. Mukhlis, Jamil, *Mediasi dan Resolusi Konflik* (Semarang: Waligana Mediation Center

tantangan yang serius bagi analis dan juga pembuat kebijakan sebab konflik itu kompleks dan heterogen.

Ketiga, Hubungan konfrontatif yang sudah berlangsung sejak lama itu menimbulkan keinginan untuk mengakhiri konflik tersebut dengan mengupayakan perdamaian, terutama dalam penyelesaian masalah Kashmir. Kedua negara mengklaim Kashmir sebagai wilayah kekuasaan masing-masing. Berbagai upaya perdamaian selama ini gagal mengakhiri krisis Kashmir. Presiden Pakistan Pervez Musharraf menandatangani serangkaian kesepakatan untuk mengurangi ketegangan di Kashmir. Musharraf dan rekan sejawatnya dari India, Manmohan Singh<sup>2</sup> sepakat untuk meningkatkan hubungan dagang dan lalu lintas di kawasan sengketa. Selain itu mereka mengeluarkan pernyataan bersama, menyatakan bahwa proses perdamaian tidak dapat ditiadakan lagi dan harus terus berlangsung.

Keempat, berbagai upaya perdamaian yang ditawarkan dari pihak-pihak baik negara maupun organisasi internasional lainnya untuk menyelesaikan konflik kudeta Kashmir ini merupakan hal yang menarik untuk di bahas lebih mendalam.

## **B. Tujuan penelitian**

- a. Mengemukakan dan menjelaskan konflik yang terjadi antara India dan Pakistan dalam perebutan wilayah Kashmir.
- b. Membahas upaya perdamaian konflik berkepanjangan antara India dan Pakistan dalam menangani masalah Kashmir.

---

<sup>2</sup> Manmohan Singh adalah perdana menteri India yang ke-14 dan merupakan anggota Partai Kongres Nasional India dan cenderung bergerak di bidang Perekonomian. Lihat lampiran

- c. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 pada Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### C. Latar Belakang Masalah

Kashmir adalah negeri berpenduduk muslim mayoritas. Sekitar 85 % dari delapan juta penduduknya beragama Islam. Wilayah seluas 222.236 Km<sup>2</sup> tersebut terletak di wilayah jantung Asia, diapit oleh China di sebelah timur, India di selatan, Pakistan dan Afghanistan di barat, serta CIS (*commonwealth of Independent State*)<sup>3</sup> di utara. Pada awalnya, negeri ini dikenal dengan sebutan “Surga Dunia”, karena keindahan alamnya yang mempesona. Kekayaan alam Kashmir ini sedikitnya memberikan pemasukan devisa sekitar 400 juta dolar per tahun dari para pelancong. Namun, keindahan Kashmir tersebut kini berubah menjadi lautan api dan darah, menjadi ladang pembantaian.<sup>4</sup>

Konflik yang mulai memanas sejak tahun 1947, lahir bersamaan dengan kemerdekaan negara India dibawah kependudukan Inggris. Kemerdekaan Inida yang diiringi dengan terpecahnya India menjadi dua bagian, yakni Pakistan di bagian barat dan India di bagian timur. Permusuhan antara India dan pakistan ini telah melahirkan banyak korban. Sejak India dan Pakistan berpisah melalui proses separasi tersebut, hubungan mereka tidak pernah harmonis. Bahkan sempat

---

<sup>3</sup> CIS merupakan persema kmuran negara-negara merdeka. Lihat lampiran

<sup>4</sup> Kashmir ” kisah dibalik kisah 1 Hek cinta ada pada “ Did you know?” di kelas pada tanggal 11/12

terlibat perang sebanyak 3 (tiga) kali perang yaitu pada tahun 1948, 1965 dan 1971.

Perselisihan berkepanjangan antara India-Pakistan yang bermuara di Kashmir ini tak lepas dari adanya konflik agama (Islam-Hindu) dan politik, baik di antara negara-negara yang bertikai maupun negara-negara lain yang punya kepentingan politik seperti Inggris, AS, dan Rusia (Soviet).

Dalam perpektif agama, adalah wajar jika Kashmir dan Pakistan berkeinginan untuk memisahkan dari kekuasaan pemerintahan India yang didominasi penganut agama Hindu. Kashmir dan Pakistan adalah negeri Islam. Apalagi jika pemerintah Hindu India tersebut memaksakan kehendaknya terhadap penduduk muslim Kashmir. Dari perselisihan tersebut muncullah kelompok militan kashmir yang menentang segala keputusan yang tidak berpihak pada kedaulatan rakyat Kashmir. Tindakan apatis dari kelompok tersebut menjadi salah satu hal yang melatar belakangi terjadinya krisis Kashmir.

Persengketaan antara India dan Pakistan yang dilatar belakangi oleh perebutan wilayah Kashmir sudah berlangsung selama lebih dari 60 tahun. Banyaknya dampak-dampak yang terjadi akibat hubungan konfrontatif tersebut, menimbulkan keinginan antara kedua belah pihak bahkan masyarakat internasional untuk mengakhiri konflik tersebut. Berbagai upaya damai yang dilakukan kedua belah pihak sejak bermulanya konflik yaitu tahun 1947 sampai sekarang banyak menemui kegagalan-kegagalan. namun pada tahun 2000-2005

upaya perdamaian mengalami keberhasilan yaitu dapat dilihat dari perundingan-

perundingan yang mengalami titik terang, yaitu kedua negara mulai membicarakan upaya perdamaian yang keduanya sama-sama menyatakan bahwa upaya perdamaian tidak bisa ditiadakan lagi.

#### **D. Rumusan Permasalahan**

Dari latar belakang diatas, maka disusun suatu rumusan permasalahan sebagai berikut:

**Bagaimanakah upaya perdamaian India – Pakistan dalam menangani konflik Kashmir periode 2000-2005?**

#### **E. Kerangka Dasar Pemikiran**

Dalam membahas upaya perdamaian India-Pakistan dalam menangani konflik Kashmir, maka teori yang digunakan yang berkaitan dengan masalah ini adalah dengan menggunakan **Teori Diplomasi**

#### **Teori Diplomasi**

Diplomasi, yang sangat erat dihubungkan dengan hubungan antar negara, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin, dalam berhubungan dengan negara lain. Apabila cara-cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara

Diplomasi merupakan cara, dengan peraturan dan tata krama tertentu, yang digunakan suatu negara guna mencapai kepentingan nasional negara tersebut dalam hubungannya dengan negara lain atau dengan masyarakat internasional.<sup>6</sup>

Diplomasi mempunyai banyak peran khususnya dalam hubungan internasional. Diplomasi digunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan perang dan damai diantara aktor-aktor yang terlibat dengan cara mempersatukan kepentingan-kepentingan yang bermacam-macam atau berusaha membuat sebagian kepentingan unggul dari kepentingan yang lain. Dengan adanya diplomasi tujuan-tujuan maksimal suatu kelompok dapat tercapai secara maksimal tanpa perang, dapat menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk sebuah perang, membantu menenangkan perang dengan membentuk aliansi, memecah belah barisan musuh, netralisasi perang, mengais keuntungan.

Seringkali hal-hal yang disarankan oleh diplomasi masih kurang dalam usaha penyelesaian konflik maka usaha terakhir yang dilakukan diplomasi adalah perang. Diplomasi merupakan perundingan yang dilakukan oleh para pejabat resmi negara sebagai pihak-pihak yang mewakili kepentingan nasional masing-masing negara.

Sebelum pada pembahasan diplomasi lebih lanjut, perlu dibahas terlebih dahulu tentang hal yang mendasari perlu diadakannya diplomasi yaitu konflik.

Konflik adalah aspek-aspek intrinsik dan tidak mungkin dihindarkan dalam perubahan sosial. Konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas

---

<sup>6</sup> Taha Wazita & Wahyuni Kantihasani, *Diplomasi Kebudayaan* (Yogyakarta: Omah, 2007)

kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan hambatan yang di wariskan.<sup>7</sup>

Konflik akan muncul apabila ada dua klaim atau lebih terhadap sumber daya langka. (Walter S. Jones dalam *The Logic International Relations*)

Konflik merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih baik individu maupun yang memiliki tujuan yang berbeda. Konflik juga sering melibatkan aktor yang bertingkat-tingkat, dengan demikian konflik terjadi dalam sebuah relasi antara pihak yang saling berhubungan.

Dalam kamus politik oleh BN. Mardun, SH dijelaskan bahwa dengan konflik dimaksudkan perwujudan dan pelaksanaan beraneka pertentangan antara 2 pihak, dan dapat merupakan 2 orang atau golongan besar (negara). Konflik digunakan untuk menyambut pertentangan antara pandangan dan perasaan seseorang, percekocokan, dan bentrokan.

Dalam upaya mencegah berulangnya konflik yang terjadi, penyelesaian konflik atau resolusi konflik dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan secara komprehensif-holistik, baik pencegahan konflik untuk memelihara perdamaian (*Peace Keeping*), mendorong transisi dan transformasi konflik dengan upaya membentuk perdamaian dan mendorong rekonsiliasi dengan membangun perdamaian.

---

<sup>7</sup> Jack Mitchell et al. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Secara empirik, resolusi konflik dilakukan dalam empat tahap. Tahap pertama masih didominasi oleh strategi militer yang berupaya untuk mengendalikan kekerasan bersenjata yang terjadi. Tahap kedua memiliki orientasi politik yang bertujuan untuk memulai proses re-integrasi elit politik dari kelompok-kelompok yang bertikai. Tahap ketiga lebih bernuansa sosial dan berupaya untuk menerapkan problem-solving approach. Tahap terakhir memiliki nuansa kultural yang kental karena tahap ini bertujuan untuk melakukan perombakan-perombakan struktur sosial-budaya yang dapat mengarah kepada pembentukan komunitas perdamaian yang langgeng (*peace- building*).

Dalam peace-building ada tahap konsolidasi. Dalam tahap konsolidasi ini, semboyan utama yang ingin ditegakkan adalah "*Quo Desiderat Pacem, Praeparet Pacem*". Semboyan ini mengharuskan aktor-aktor yang relevan untuk terus menerus melakukan intervensi perdamaian terhadap struktur sosial dengan dua tujuan utama yaitu mencegah terulangnya lagi konflik yang melibatkan kekerasan bersenjata serta mengkonstruksikan proses perdamaian langgeng yang dapat dijalankan sendiri oleh pihak-pihak yang bertikai. (Miall: 2000, 302-344).

Dua tujuan tersebut dapat dicapai dengan merancang dua kegiatan. Kegiatan pertama adalah mengoperasionalkan indikator sistem peringatan dini (early warning system, Widjajanto: 2001) Sistem peringatan dini ini diharapkan dapat menyediakan ruang manuver yang cukup luas bagi beragam aktor resolusi konflik dan memperkecil kemungkinan penggunaan kekerasan bersenjata untuk



Kedua, perlu dikembangkan beragam mekanisme resolusi konflik lokal yang melibatkan sebanyak mungkin aktor-aktor non militer di berbagai tingkat eskalasi konflik (Widjajanto: 2001). Aktor-aktor resolusi konflik tersebut dapat saja melibatkan Non-Governmental Organisations (NGOs), mediator internasional atau institusi keagamaan.<sup>8</sup>

Dalam situasi tertentu penanganan dan penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui keterlibatan pihak ketiga<sup>9</sup>. Dalam hal ini ada dua konteks pandangan terhadap keberadaan pihak ketiga yaitu pandangan pesimistik yaitu meragukan kemampuan pihak ketiga secara efektif mampu mempengaruhi proses negosiasi dan implementasi kesepakatan-kesepakatan perdamaian antara pihak yang terlibat dalam konflik, selain itu pesimistik juga percaya bahwa intervensi melalui tindakan yang bersifat paksaan coercive dan non-coercive oleh para aktor dari pihak luar akan bersifat marjinal dan bahkan kontra produktif.

Sedangkan pandangan optimistik bahwa tindakan coercive dan non-coercive yang terukur dapat digunakan secara efektif untuk mengani konflik dan membawa para pihak yang terlibat didalamnya ke meja negosiasi atau melakukan akomodasi politik untuk mengakhiri konflik. Dalam masalah ini perlu adanya pendekatan-pendekatan sebagai penengah, yaitu pendekatan yang berorientasi pada keamanan negara, pendekatan psikologi sosial yang berorientasi pada kemanusiaan, dan pendekatan yang didasarkan pada pemerintah yang berfokus pada jalinan negara dan masyarakat dan peran pihak ketiga.

---

<sup>8</sup>Resolusi Konflik, "Tahap-tahap Resolusi Konflik", di akses tanggal 1 Maret 2008; di akses dari

Adanya pihak ketiga dalam penyelesaian konflik dapat membantu mengurangi ataupun meredam konflik antara kedua pihak yang bertikai. Pihak ketiga merupakan perantara yang netral (tidak memihak), dan dipercaya oleh kedua belah pihak yang bertikai. Pihak ketiga harus bertanggung jawab dalam menyelesaikan suatu masalah atau konflik.

Jacob Bercovitch, menggambarkan bentuk mediasi sebagai suatu proses manajemen konflik, dimana para pihak yang bertikai mencari bantuan ataupun menerima usaha dari seseorang, suatu kelompok, negara ataupun organisasi guna menyelesaikan konflik sebagai penengah bagi perbedaan yang mendasar diantara pihak yang bertikai, tanpa terpaksa menggunakan jalan kekerasan ataupun meminta/ memohon otoritas hukum.

Kondisi-kondisi yang memungkinkan mediasi :

- a. Perselisihan yang sangat lama, bersifat berlarut-larut dan kompleks
- b. Usaha-usaha yang dilakukan pihak-pihak yang berselisih menemui jalan buntu.
- c. Tidak satu pun pihak yang siap menyetujui untuk menanggung ganti rugi ataupun peningkatan konflik selanjutnya.
- d. Para pihak yang berselisih setuju untuk mencari jalan keluar dengan bekerja sama satu sama lain dan menjalin komunikasi.

Diplomasi telah dikategorikan menurut metode yang dipakai dalam hubungan-hubungan diplomatic. Adapun kategori-kategori ini dibedakan menjadi beberapa tipe yaitu : diplomasi komersial, diplomasi demokratis, diplomasi

totaliter, diplomasi melalui konferensi, diplomasi diam-diam, diplomasi preferentive dan diplomasi sumberdaya.

Namun dalam membahas masalah ini lebih cenderung melalui diplomasi konferensi atau *diplomacy by conference*. Dalam melaksanakan diplomasi ini memerlukan organisasi internasional sebagai wadah atau forum internasional dimana para wakil negara-negara membicarakan kepentingan-kepentingan yang saling menguntungkan atau bahkan bertentangan dan berusaha memecahkannya melalui perundingan.<sup>10</sup>

Negosiasi merupakan cara penyelesaian konflik secara damai. Dalam negosiasi, kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan akan diupayakan penyelesaiannya dengan suatu komitmen bersama. Negosiasi terdiri dari 5 tahap, masing-masing tahapan membicarakan masalah yang berbeda-beda. Seperti yang dikemukakan Harold. H. Saunders yaitu “ *five areas in course of negotiating process : defining the problem, producing a commitment to negotiated settlement arranging a negotiation, the actual negotiation, and implementation.*”

Kesulitan besar justru terletak pada pra negosiasi, yaitu bagaimana membawa pihak-pihak yang bertikai yang sering kali menolak untuk diajak berunding dan mempertahankan pendapatnya.

Menurut C. R Mitchel yang menjadi dasar peran mediasi yang dilakukan oleh seseorang atau suatu badan organisasi tetap terkandung motivasi atau nilai tertentu. Dalam peran mediator ada dorongan untuk memperoleh imbalan yang

kuat yang nantinya akan menjadi dasar mengapa seseorang atau suatu badan menjalankan peran sebagai mediator.

Institusi internasional adalah sebuah aturan yang eksplisit dan di negosiasikan diantara aktor-aktor internasional yang menyarankan, melarang, atau mengatur tingkah laku anggotanya.

Konflik yang bermula akibat rencana partisi yang diputuskan tanggal 3 Juni 1947 ketika pemerintah Inggris menyetujui rencana partisi anak benua India menjadi 2 negara terpisah yaitu India dan Pakistan berdasarkan prinsip keagamaan yang menentukan bahwa wilayah-wilayah yang mayoritas penduduknya muslim harus masuk wilayah Pakistan, sementara yang mayoritas penduduknya Hindu harus masuk India. Keputusan ini sebagaimana disampaikan oleh Gubernur Jenderal India pada waktu itu yaitu Lord Mountbatten antara lain untuk mencegah peperangan di antara dua kelompok agama yang tidak dapat lagi didamaikan. Rencana partisi ini akhirnya disetujui oleh pihak-pihak yang berkepentingan yaitu pemerintah kolonial Inggris, India dan Pakistan. Hal itulah yang mendorong terjadinya tragedi Kashmir.

Sesuai dengan asas partisi yang disetujui bersama maka seharusnya Kashmir masuk wilayah Pakistan tanpa masalah karena mayoritas penduduknya Muslim walaupun penguasanya adalah Hindu. Kashmir yang mayoritas penduduknya beragama Islam pada tanggal 15 Agustus 1947 menyatakan penggabungan dengan Pakistan dan merayakan kemerdekaan Pakistan, namun segera dihentikan oleh tentara kerajaan Kashmir dengan kekerasan, dan sejak saat

itulah tragedi di Kashmir bermula. Pemerintah kerajaan Kashmir memberlakukan undang-undang darurat untuk mencegah berlanjutnya dukungan terhadap Pakistan.

Masalah Kashmir akhirnya memancing PBB untuk campur tangan. PBB membentuk sebuah komisi yang dikenal dengan nama United Nations Commission for India and Pakistan (UNCIP) 1948. Resolusi dewan keamanan tanggal 21 April tahun 1948 menyatakan bahwa plebisit harus dilaksanakan di Kashmir dengan memberikan hak kepada rakyat Kashmir untuk bergabung kepada Pakistan atau India.

Namun setelah usaha-usaha memaksa India untuk menaati resolusi PBB tidak pernah terlaksana. Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi baru tanggal 24 Januari tahun 1957 mengulangi prinsip-prinsip dari resolusi sebelumnya yaitu resolusi tahun 1948, tahun 1950, tahun 1951 dan resolusi UNCIP tanggal 13 Agustus 1948 dan tanggal 5 Januari 1949 yang isinya menyatakan bahwa masa depan negara Jammu dan Kashmir harus diputuskan sesuai dengan kehendak rakyat yang dinyatakan melalui cara-cara yang demokratis dengan melaksanakan plebisit yang bebas dan tidak memihak di bawah pengawasan PBB.<sup>11</sup>

Dalam menyelesaikan konflik Kashmir, India dan Pakistan telah menempuh berbagai jalan. Setelah lima tahun tak mau berkunjung ke Pakistan dan lebih dari dua tahun tak sudi berbicara dengan pemimpin negara tetangga itu, pada

---

<sup>11</sup> *Konflik Kashmir. "penyelesaian konflik Kashmir"*, diakses tanggal 10 Mei 2009; diadaptasi dari

tanggal 3 Januari lalu, Perdana Menteri India Atal Behari Vajpayee menapakkan lagi kakinya di Pakistan, secara resmi ia datang untuk menghadiri pertemuan puncak (Konferensi Tingkat Tinggi) tahunan Asosiasi Kerja Sama Regional Asia Selatan (SAARC) di Islamabad. Namun, tujuan pokok sesungguhnya adalah memulai kembali usaha perdamaian India-Pakistan yang buntu sejak pertemuan puncak bilateral di Agra (India), Juli 2001, di mana para pemimpin kedua negara yang berseteru itu gagal mencapai kesepakatan damai.

Pada tanggal 5 Januari, sehari setelah dimulainya KTT SAARC, Perdana Menteri (PM) Vajpayee dan Presiden Pakistan Pervez Musharraf melakukan pertemuan bilateral. Ini merupakan pertemuan historis, yang merupakan langkah awal dimulainya kembali usaha perdamaian di antara kedua negara utama di Asia Selatan itu. Pertemuan ini membuahkan kejutan yang menyegarkan, yaitu berupa kesepakatan di antara kedua pemimpin untuk memulai dialog menyeluruh. Vajpayee dan Musharraf juga sama-sama berkeyakinan bahwa proses perundingan itu pada akhirnya juga akan menyelesaikan konflik Kashmir, yang sudah berlangsung selama lebih dari setengah abad dan merupakan sumber utama perselisihan antara India dan Pakistan yang sama-sama bersenjata nuklir.

## **F. Hipotesa**

Dari permasalahan diatas dapat ditarik suatu hipotesa, yaitu :

Hubungan konfrontatif antara India dan Pakistan yang dilatar belakangi oleh perebutan wilayah Kashmir yang telah berlangsung lama, menimbulkan

keinginan antara kedua belah pihak untuk mengakhiri persengketaan tersebut. Berbagai upaya damai yang dilakukan sejak tahun 1947 banyak menemui kegagalan. Namun sejak tahun 2000 upaya perdamaian mengalami kemajuan, Kedua negara semakin meningkatkan perannya dengan mengadakan kembali perundingan-perundingan dan meningkatkan upaya perdamaian. Dalam hal ini, baik pemerintah maupun organisasi internasional yang terlibat dalam usaha perdamaian tersebut meningkatkan perannya demi mewujudkan stabilitas dan keamanan di wilayah Kashmir.

### **G. Jangkauan Penulisan**

Penulisan dimulai periode 2000 sampai 2005 dimana India dan Pakistan berhasil membuat kesepakatan dalam usaha perdamaian kedua negara. Namun hal-hal ataupun kejadian yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya turut menjadi perhatian penulis.

### **H. Metode Penelitian**

Pengumpulan data dengan metode penelitian kualitatif atau studi literature berupa kajian yang bersifat deskriptif. Data-data diperoleh melalui studi pustaka menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku teks, jurnal, ensiklopedia

artikel, media massa ataupun elektronik seperti internet, serta laporan maupun tulisan-tulisan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

## **I. Sistematika Penulisan**

### **BAB I            PENDAHULUAN**

- A. Alasan Pemilihan Judul
- B. Tujuan Penelitian
- C. Latar Belakang Masalah
- D. Rumusan Permasalahan
- E. Kerangka Dasar Pemikiran
- F. Hipotesa
- G. Jangkauan Penulisan
- H. Metode Penelitian

### **BAB II            SEJARAH            TERJADINYA            HUBUNGAN KONFRONTATIF INDIA DAN PAKISTAN**

- A. Sejarah India dan Pakistan
  - 1. India
  - 2. Pakistan
- B. Hubungan Konfrontatif India dan Pakistan
- C. Sejarah Konflik Kashmir
  - 1. Gambaran Geografis
  - 2. Sistem Pemerintahan



3. Kon

BAB III UPAYA PI  
MENANGA

1. Konf

2. Konf

BAB IV UPAYA INI  
PERANANN  
KASHMIR (I

1. La

Pal

2. Art

per:

Kas

a. I

b. C

3. Pera

men: